

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN
DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2003-2012**

Afiah Mukhtar

STIE Tri Dharma Nusantara

Email : afiah.muhtar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar tahun 2003-2012. Lokasi penelitian di Kota Makassar dan pusat pengambilan data pada kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder (Time Series) selama runtun waktu 10 tahun (2003-2012). Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Dana Perimbangan (DP) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi.

**THE INFLUENCE OF REGENCY INCOME, CENTRAL GOVERNMENT
RESOURCES INCOME, INVESTMENT TO ECONOMIC GROWTH
IN MAKASSAR FROM 2003-2012**

Afiah Mukhtar

STIE Tri Dharma Nusantara

Email : afiah.muhtar@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the influence of regency income, central government resources income, and investment to economic growth in Makassar from 2003-2012. Research location in Makassar City and center of data collection in Center of Statistic Body South Sulawesi Province. Data used are secondary data (time series) in ten years (2003-2012). The result of this research shows that regency income has positive influence but not significant to economic growth, central resources income has positive and significant relation to economic growth, investment has negative and not significant in fluence to economic growth in Makassar city.

Key Words : Regency Income, Central Government Resources Income, Investment, Economic Growth

PENDAHULUAN

Kebijakan tentang otonomi daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang telah membawa konsekuensi tersendiri bagi daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan harapan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah. Kebijakan tersebut dicanangkan oleh Pemerintah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

yang direvisi dengan UU Nomor 33 Tahun 2004. Kebijakan tersebut bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Hal tersebut dikarenakan, dalam UU tersebut diamanatkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik (*public service*).

Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah, serta mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu juga terdapat sumber lain yang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah.

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah dalam mengembangkan menurut potensi masing-masing. Menurut Saragih (2003 : 74), otonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan memberikan manfaat yang optimal jika diikuti oleh kemampuan finansial yang memadai oleh daerah otonom. Menurut Susanti (2008 : 85), dengan adanya desentralisasi fiskal daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerahnya sehingga mampu bersaing dengan daerah lain melalui penghimpunan modal pemerintah untuk kebutuhan investasi dan atau kemampuan berinteraksi dengan daerah lain.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengoptimalkan PAD sehingga harusnya porsi PAD sebagai komponen penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Pujiati, 2008 : 45). Perkembangan PAD di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar Tahun 2003-2012”

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Seberapa kuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar tahun 2003-2012 ?
2. Seberapa kuat pengaruh Dana Perimbangan (DP) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar tahun 2003-2012 ?
3. Seberapa kuat pengaruh Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar tahun 2003-2012 ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Menciptakan desentralisasi berarti akan terjadi pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintah dalam hal pembelajaran, pemberian kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat (Sidik, 2002 : 33).

Menurut Kusaini (2006 : 29) desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Menurut Rondinelli dalam Cheng (2005 : 51), desentralisasi adalah transfer tanggung jawab dari perencanaan, manajemen dan sumber peningkatan dan alokasi dari pemerintah pusat kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Meskipun demikian secara utuh mengenai desentralisasi tidak mudah untuk mendefinisikan karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam terutama menyangkut aspek fiskal, politik, administrasi, sistem pemerintahan serta pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum desentralisasi terdiri dari desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal dan desentralisasi ekonomi (Sidik, 2002 : 38).

Menurut Bird dan Vaillancourt dalam Badrudin (2012 : 63), desentralisasi fiskal mempunyai tiga pengertian, yaitu 1) dekonsentrasi, artinya pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah; 2) delegasi, artinya daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah; dan 3) devolusi, artinya berhubungan dengan situasi tertentu yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Pasal 1), desentralisasi fiskal adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Rochjadi (2006 : 35), desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Komponen-Komponen Desentralisasi Fiskal

Sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri (Bratakusuma, 2001 : 148). Sutrisno (1984 : 200) pendapatan asli daerah adalah suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya. Menurut pasal 6 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Perusahaan Daerah, dan Penerimaan Dinas-dinas dan Pendapatan Lain-lain yang disahkan.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun jenis-jenis dana perimbangan adalah sebagai berikut :

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, (Sidik, 2004). Dimana menurut Pasal 11 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari pajak terdiri dari : 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21, Sedangkan pada pasal 11 ayat 2 Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari 1) kehutanan, 2) pertambangan umum, 3) perikanan, 4) pertambangan minyak bumi, 5) pertambangan gas bumi, 6) pertambangan panas bumi. Proporsi dana bagi hasil menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP), Pajak Penghasilan (PPh), Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi dan Pertambangan Panas Bumi.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintahan pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD pada daerah otonom. DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Wikipedia, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan daerah otonomi dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN. Yang dimaksud sebagai daerah tentunya adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus.

d. Pinjaman Daerah

Untuk membiayai kebutuhan daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal), daerah juga dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar negeri dengan persetujuan Pusat.

e. Lain-lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat (Nurcholis, 2005 : 56). Hibah kepada daerah, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui pemerintah (pusat). Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak (bencana nasional dan atau peristiwa luar biasa) yang tidak dapat diatasi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

f. Investasi

Investasi dalam berbagai bentuknya akan memberikan banyak pengaruh kepada perekonomian suatu negara ataupun dalam cakupan yang lebih kecil yakni daerah. Karena dengan terciptanya investasi akan membawa suatu negara pada kegiatan ekonomi tertentu.

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat pendapatan nasional. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran (Sukirno, 2000 : 47).

Pertumbuhan Ekonomi

Membahas tentang pertumbuhan ekonomi, kita telah mengetahui secara bersama bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi nasional dan regional secara fisik, atau dalam istilah umum adalah peningkatan Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto. PDB atau PDRB adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian negara atau daerah dalam waktu satu tahun. Atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dua abad sekarang ini. Disamping itu juga merupakan masalah dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan dari trilogi pembangunan yang harus dipenuhi sebagai landasan pembangunan yang diukur dengan berkembangnya produk barang dan jasa yang sangat diperlukan karena ada dua faktor yang sangat menentukan yakni bertambahnya jumlah produk dari tahun ke tahun dan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai hasil pembangunan itu sendiri, sehingga

masyarakat sangat membutuhkan banyak barang dan jasa baik itu barang privat maupun barang publik.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyangkut perkembangan yang per dimensi tunggal dan diukur dengan meningkatkan hasil produksi dan pendapatan. Dalam pertumbuhan ekonomi ditelaah proses produksi yang melibatkan sejumlah sarana produksi tertentu.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa pertumbuhan ekonomi ada apabila terdapat lebih banyak output, tetapi juga perubahan-perubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan teknik dalam menghasilkan output yang lebih banyak. Pertumbuhan dapat meliputi penggunaan lebih input dan lebih efisien yaitu adanya kenaikan output per satuan unit.

Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dan kemampuan suatu negara untuk menyediakan banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan ideologis yang diperlukan. Definisi ini memiliki tiga komponen yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa atau daerah terlihat dengan meningkatnya secara terus menerus ketersediaan barang.
2. Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka barang kepada penduduk.
3. Pertumbuhan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto yaitu tambahan nilai yang ditimbulkan oleh aktivitas faktor-faktor produksi dalam merubah/memproses bahan-bahan baku dan penolong sehingga lebih dekat kepada pengguna nilai barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor produksi. Apabila seluruh nilai tambah bruto atau nilai barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi dalam wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dijumlahkan maka diperoleh produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Nilai-nilai dari PDRB dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu :

1. Dari segi produksi, PDRB adalah jumlah nilai netto produksi barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
2. Dari segi pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
3. Dari segi pengeluaran, PDRB adalah jumlah pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor netto di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Dari segi penyajiannya, PDRB selalu dibedakan kedalam dua pendekatan yaitu PDRB atas harga berlaku dan PDRB atas harga konstan. Adapun yang dimaksud dengan PDRB atas dasar harga berlaku jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB atas harga konstan adalah merupakan jumlah nilai produksi, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap pada tahun dasar dan dalam publikasi ditetapkan tahun dasar adalah tahun sebelumnya.

Kegiatan ekonomi secara garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan memproduksi dan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa. Unit-unit produksi memproduksi barang dan jasa dari kegiatan memproduksi ini timbul pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang telah dimiliki oleh berbagai golongan dalam masyarakat, sehingga dari pendapatan ini masyarakat akan membeli barang dan jasa baik untuk kepentingan konsumsi maupun investasi.

Dengan demikian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berfungsi sebagai indikator tingkat pertumbuhan ekonomi, indikator tingkat pertumbuhan *income* per kapita, indikator tingkat kemakmuran, indikator tingkat inflasi dan deflasi, indikator struktur perekonomian dan indikator hubungan antar sector.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Hasil pengujian data digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di kota Makassar. Ruang lingkup penelitian ini dilaksanakan dengan memusatkan pembahasan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Waktu penelitian dilaksanakan pada Agustus 2014 sampai November 2014.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non perilaku. Observasi non perilaku adalah metode pengumpulan data dimana peneliti tidak terlibat hanya sebagai pengamat independen. Dengan metode ini semua data diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat serta mempelajari uraian-uraian dari buku-buku, karya ilmiah berupa jurnal, tesis dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara mendasar dan benar. Metode tesis yang digunakan penulis adalah pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Data yang penulis maksud dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. Data yang diperoleh adalah hasil akhir berupa penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Investasi tahun 2003-2012.

Metode Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisa regresi liner berganda yang merupakan metode kuantitatif deskriptif untuk menganalisa data lebih dari satu variabel penelitian. Metode analisis regresi yang digunakan adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Dimana :

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| Y | = Pertumbuhan Ekonomi |
| X ₁ | = Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
| X ₂ | = Dana Perimbangan |

- X_3 = Investasi
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
 β_0 = Konstanta
 β = Koefisien Regresi atau Slope

Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi tentang variabel-variabel yang digunakan dan menghindari terjadinya perbedaan penafsiran, maka penulis memberikan batasan-batasan definisi operasional sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah sumber PAD yang berasal dari total pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan dinyatakan dalam satuan Rupiah tahun 2003-2012 di Kota Makassar.
2. Dana Perimbangan (X2) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Kota Makassar untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana perimbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah akumulasi keseluruhan total sumber pendanaan dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, DBH Kota Makassar yang dinyatakan dalam Rupiah tahun 2003-2012.
3. Investasi (X3) adalah total realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Kota Makassar yang dinyatakan dalam satuan Rupiah tahun 2003-2012.
4. Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang dilihat dari meningkatnya PDRB Kabupaten/Kota. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB dasar harga konstan dalam satuan Rupiah tahun 2003-2012.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berikut ini peneliti menyajikan data PDRB atas dasar harga konstan.

Tabel 1.

Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2003-2012 di Kota Makassar

No	Tahun	PDRB Harga Konstan (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Kenaikan/Penurunan
				Jumlah (Jutaan Rupiah)
1	2003	8.882.255.000	6,59	-
2	2004	9.785.334.000	7,26	903.079.000
3	2005	10.492.541.000	7,78	707.207.000
4	2006	11.341.848.000	8,41	849.307.000
5	2007	12.561.827.000	9,09	919.690.000
6	2008	13.551.827.000	10,06	1.300.289.000
7	2009	14.798.187.000	10,97	1.236.360.000
8	2010	16.252.451.000	12,05	1.454.264.000
9	2011	17.820.697.000	13,22	1.568.246.000
10	2012	19.582.060.000	14,52	1.761.363.000
Total		134.778.738.000	99,95	10.699.805.000
Rata-rata		13.477.873.800	9,995	1.069.980.500

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, data diolah

Secara keseluruhan total PDRB tahun 2003-2012 sebesar 134.778.738.000 miliar rupiah atau total rata-rata Rp.13.477.873.800 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 9,995 %.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari hasil regresi diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yaitu 0,120 dan nilai probabilitas $0,076 > 0,05$. Hasil hipotesis pada awal penelitian tidak sesuai yang menduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Hal ini serupa dengan penelitian Winda Srilianti (2011) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB Kota Kotamobagu.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang sangat mempengaruhi karena sebagai pendapatan yang dihasilkan sendiri dan dimanfaatkan secara leluasa oleh daerah, sehingga Pendapatan Asli Daerah perlu mendapat perhatian khusus oleh pemda setempat dalam rangka mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang digali dari sumber keuangannya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dll. Oleh karena itu sebaiknya di kelola secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan PDRB di Kota Makassar.

Pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah lebih mengoptimalkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki daerah sendiri sebagai peneriman daerah. Bukan hanya bergantung pada transfer dana pemerintah pusat, yaitu lewat Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.

Dana Perimbangan

Variabel Dana Perimbangan (DP) dari hasil penelitian diperoleh hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yaitu 0,683 dan nilai probabilitas $0,001 < 0,05$. Nilai koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap nilai PDRB. Hal ini berarti setiap kenaikan Dana Perimbangan sebesar 1 persen maka nilai PDRB atau Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar akan mengalami kenaikan sebesar 68,3 % dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dianggap konstan. Nilai probabilitas $0,001 < 0,05$ diartikan Dana Perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal bahwa Dana Perimbangan (DP) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.

Dari hasil penelitian bahwa Dana Perimbangan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil temuan Maryati (2007) dari hasil penelitiannya menyimpulkan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatra Selatan.

Dana Perimbangan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar mengindikasikan bahwa ketergantungan Kota

Makassar terhadap pemerintah pusat sangat tinggi yang tercermin dari lebih besarnya jumlah Dana Perimbangan dibanding Pendapatan Asli Daerahnya. Ketidakseimbangan fiskal (*fiscal imbalance*) yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini telah menyebabkan ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada bantuan dari pemerintah pusat.

Padahal sebenarnya bantuan dana dari pemerintah pusat tersebut hanyalah untuk rangsangan bagi daerah agar lebih meningkatkan sumber penerimaan pendapatan asli daerahnya, yang merupakan bagian penting dari sumber penerimaan daerah, bukan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam penerimaan daerah.

Investasi

Dari hasil olah data Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yaitu -0,044 dan nilai 0,167 > 0,05. Nilai koefisien regresi yang negatif ini menunjukkan bahwa Investasi berpengaruh negatif terhadap nilai PDRB atau pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal bahwa Investasi (I) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar.

Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar dapat diartikan bahwa kenaikan Investasi Swasta sebesar 1 persen maka nilai Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 4,4 % dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain dianggap konstan. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil temuan Jocas, Marques (2012) investasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Timor Leste disebabkan oleh kualitas investasi tidak tepat pada sasaran pertumbuhan ekonomi serta arah investasi yang menitikberatkan pada pembiayaan Negara.

Hal ini bertolak belakang dengan teori sebelumnya bahwa peningkatan investasi selaras dengan pertumbuhan ekonomi, penulis berasumsi merujuk pada teori Ricardian Equivalence (RE) bahwa kebijakan defisit anggaran tidak mempunyai pengaruh terhadap perekonomian, termasuk di dalamnya tingkat konsumsi, investasi, suku bunga, dan tingkat harga. Dalam teori (RE) diasumsikan bahwa dalam perekonomian hanya terdapat satu pelaku ekonomi (*a representative agent*) yang hidup sepanjang waktu (*Infinite Horizon*). Pelaku ekonomi tersebut mempunyai informasi yang sempurna (*perfect foresight*) untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Pelaku ekonomi secara sempurna dapat melakukan optimasi untuk mencapai tujuan hidupnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wisda (2014 : 76) bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Sehingga penulis mengasumsikan bahwa teori Ricardian Equivalence (RE) berlaku untuk wilayah Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar dapat melakukan optimasi untuk mencapai tujuan pembiayaan daerahnya. Teori (RE) pada dasarnya merupakan pengembangan teori pendapatan permanen dan hipotesis siklus hidup (*Permanent Income and Life Cycle Hypothesis* atau PILCH).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Ini ditandai dengan nilai koefisien regresi yaitu 0,120 dan nilai signifikan 0,076.
2. Dana Perimbangan (DP) memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Ini ditandai dengan nilai koefisien regresi yaitu 0,683 dan nilai signifikan 0,001.

3. Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar. Ini ditandai dengan nilai koefisien regresi yaitu - 0,044 dan nilai signifikan 0,167.

Saran

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar merupakan sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.
2. Untuk mendorong peningkatan investasi diperlukan kebijakan pemerintah yang mampu memberikan kepastian berusaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, maka sebaiknya mempertimbangkan unsur kebijakan pemerintah tentang peraturan berinvestasi dan situasi politik di Kota Makassar.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji kembali penelitian ini (atas masalah yang sama) dengan menggunakan metode pendekatan, serta konsep peninjauan yang berbeda agar dapat dilakukan studi komparasi dan dukungan temuan-temuan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- _____, 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pengaturan Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Anonim. 2004. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah*.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta : YKPN.
- Arsyad, Lincoln. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Yogyakarta : YKPN.
- Azzumar, Mr. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Swasta, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Era Desentralisasi Fiskal Tahun 2005-2009*.
- Badan Pusat Statistik Sulsel. 2013. *Makassar dalam Angka 2010*. Makassar : Provinsi Sulawesi Selatan.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Bratakusuma, Deddy Supriady. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Cawley. P. 1981. *Ekonomi Orde Baru*, Jakarta : LP3ES.
- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : UI Press.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Jhingan. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta : Rajawali Press.
- Kaho, Josef Riwu. 1998. *Prospek Otonomi Daerah*, Jakarta : P.T. Raja Grafindo.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Erlangga.
- Kusaini, Muhammad. 2006. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*, Malang : BPFE UNBRAW.
- Mankiw, N Gregory. 2000. *Microeconomics*, Worth Publisher Inc, New York.
- Mardiasmo. 1997. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nasution, Lia Nazliana. 2008. *Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Era Otonomi Daerah*, (repository.usu.ac.id/bistream) diakses 11 Maret 2014.
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo Rahardjo Mudjia.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.

- Pujiati, Amin. 2008. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang : Era Purwoko*.
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia : Tinjauan Historis, Teoritis*, Jakarta. Rajawali Press.
- Rochjadi, Achmad. 2006. *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2005*, Jakarta : Kementrian Keuangan.
- Rondinelli, Dennis A. *Development Projects as Policy Experiments, An Adaptive Approach to Development Administration*. New York : Routledge, 1981.
- Samuelson, P, A dan Nordhaus, W, D. 1993. *Makro Ekonomi*, Edisi Tiga Belas, Alih Bahasa Haris Munandar dkk, Jakarta : Erlangga.
- Saragih, JP. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta Ghalia Indonesia.
- Sidik, Mahfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah : Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Disampaikan pada seminar “Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Indonesia”, Yogyakarta.
- Sidik, Mahfud. 2004. *Prinsip dan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Berbagai Negara dalam Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*, Jakarta. Dirjen PKPD.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sulaiha, Wisda. 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Makassar 2003-2012*. Makassar : Tesis Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
- Sumarsono, H., Hadi S. 2009. *Deliberate Inflation pada Kebijakan Desentralisasi Fiskal Jawa Timur dan Dampaknya bagi Pertumbuhan Daerah*. JESP Vol. 1 No. 3, 2009. Malang : FE Universitas Negeri Malang.
- Suparmoko. 2007. *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta : BPFE.
- Susanti, Hera, Moh. Ikhsan, dan Widyanti. 2008. *Indikator-Indikator Makroekonomi*, Edisi 2. Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI.
- Susiyati. 2007. *Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Jakarta. FEUI.
- Sutrisno, Hadi. 1984. *Pertumbuhan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta : CSIS.
- Suyatno, Thomas. 1999. *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Taaha, Yulian Rinawaty. 2011. *Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah*. Makassar : Tesis Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Waluyo, Joko. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia*. <http://www.waluyo.com> diakses 14 Mei 2014.